
**PRINSIP FALSIFIKASI POPPER DAN RELEVANSINYA BAGI PENGUATAN
DEMOKRASI DI INDONESIA**

Emilianus Julio Namput¹, Fridolin Anus Abu²

^{1,2}Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero

Email: julionamput@gmail.com

Abstrak: Artikel ini membahas prinsip falsifikasi yang dikemukakan oleh Karl Popper dan relevansinya dengan praktik demokrasi di Indonesia, dengan fokus pada fenomena politik dinasti. Prinsip falsifikasi, yang merupakan dasar dari pemikiran ilmiah menurut Popper, menyatakan bahwa suatu teori hanya dapat dianggap ilmiah jika ia dapat diuji dan dibuktikan dengan benar. Konsep ini diterapkan dalam konteks politik Indonesia untuk menganalisis apakah praktik politik dinasti, yang semakin marak di berbagai daerah di Indonesia, dapat dianggap sebagai ancaman terhadap prinsip demokrasi yang sehat. Politik dinasti, yang melibatkan penguasaan kekuasaan oleh keluarga atau klan tertentu, seringkali dipandang sebagai bentuk oligarki yang menghambat partisipasi masyarakat luas dalam proses politik. Artikel ini menganalisis bagaimana politik dinasti, yang sulit dipertanyakan atau diuji secara terbuka, bertentangan dengan prinsip falsifikasi Popper dan dapat mengarah pada pengurangan kualitas demokrasi. Dengan menggunakan perspektif ini, artikel ini mengkritisi dinamika politik Indonesia, menawarkan rekomendasi untuk memperkuat mekanisme dalam demokrasi Indonesia, dan memastikan bahwa demokrasi yang berkembang lebih inklusif dan adil. Prinsip falsifikasi Popper secara frontal dapat menganalisis kejahatan politik dengan pemikirannya yang kritis. Teori falsifikasi mengajarkan pentingnya menguji dan memverifikasi klaim politik dengan dasar bukti yang objektif.

Kata Kunci: Prinsip Falsifikasi, Karl Popper, Politik Dinasti, Demokrasi.

Abstract: *The purpose of writing this article is to review literature, journals and articles on mathematical problem-solving skills through problem-based learning. The methods used in this research are systematic literature review and publish or perish. In the search for articles using these keywords with journal publications in 2018-2024. The 9 articles used in this study were obtained from Google Scholar & publish or prish. The results of the journal literature review conducted showed that problem-solving skills can be improved through problem-based learning.*

Keywords: *Ability, Problem Solving, Mathematics, PBL.*

PENDAHULUAN

Demokrasi di Indonesia terus berkembang meski menghadapi berbagai tantangan. Sebagai negara dengan sistem pemerintahan demokratis, Indonesia menjamin kebebasan berpendapat dan partisipasi politik. Namun, tantangan seperti polarisasi politik, politik dinasti, serta kecenderungan dalam tindakan korupsi masih sering muncul dalam kehidupan publik. Dalam konteks ini, teori falsifikasi yang diperkenalkan oleh filsuf ilmiah Karl Popper menawarkan pandangan yang sangat relevan untuk memperkuat sistem demokrasi di Indonesia. Falsifikasi, yang menekankan pentingnya menguji dan memverifikasi klaim secara objektif, memberikan dasar bagi pentingnya kritik, pembaruan, dan transparansi dalam kebijakan publik serta kehidupan politik secara umum. Artikel ini akan membahas bagaimana falsifikasi Popper dapat berkontribusi terhadap dinamika demokrasi di Indonesia.

Popper dikenal dengan gagasan falsifikasi sebagai lawan dari verifikasiisme dan induktivisme klasik dalam metode ilmiah. Falsifikasiisme mengatakan bahwa suatu teori ilmiah tidaklah terbukti keilmiahannya hanya dengan pembuktian saja, tapi harus diusahakan mencari kesalahan dari teori tersebut sampai kemudian teori tersebut bisa difalsifikasi. Apabila teori tersebut tidak berhasil difalsifikasi, maka teori tersebut tidak teruji keilmiahannya. Popper juga dikenal sebagai penentang besar aspek justifikasiisme dalam studi ilmiah yang dilakukan para induktivis. Ia memahami bahwa keseluruhan studi ilmiah tidak semestinya dicapai dengan justifikasi, melainkan rasionalisme kritis. Secara historis genealogi pemikiran Popper cenderung berbeda dengan rasionalisme konvensional Descartes yang lebih menekankan bahwa ilmu pengetahuan bersumber kepada rasio. Rasionalisme Popper merupakan pandangan bahwa rasio dapat menemukan kebenaran, akan tetapi rasio juga harus mempunyai keterbukaan untuk mengakui bahwa suatu pengetahuan bisa salah dalam hal mendekati kebenaran. Istilah rasionalisme Popper di sini, menunjukkan upaya pemecahan masalah dengan bertendensi pada akal. Tak lain, merupakan pikiran jernih dan pengalaman yang bersandar pada perasaan atau nafsu. Menurut Popper, pengamatan dan percobaan selalu menekankan ujian terhadap teori. Sesuai dengan prinsip empirisme, yang menyatakan bahwa dalam ilmu hanya mungkin didapat melalui pengamatan dan pengalaman.

KAJIAN PUSTAKA

Falsifikasi Popper Dalam Demarkasi

Dalam hal ini, Popper senantiasa memperlawankan pendekatan objektivitas dan pendekatan subjektivitas. Sebagaimana pendekatan objektivitas memandang pengetahuan dalam dimensi makro atas suatu problematika. Sedangkan pendekatan subjektivitas di dalamnya terkandung pandangan rasionalistik. Kedua aspek aliran tersebut, membentuk sebuah garis pembeda yang memisahkan pengetahuan subyektif dengan pengetahuan objektif. Kemudian, Popper mengajukan metode falsifikasi empirik untuk menggantikan metode verifikasi empirik. Meskipun, falsifikasi Popper dilakukan melalui pengujian yang sifatnya empiris (dan empirisme Popper tidak seperti hubungan kausal yang menyertakan sebab-akibat dan bukan dari partikular menuju ke universal). Prinsip empirisme Popper terlahir dari pengetahuan apriori yang digali dari pengetahuan apriori Kant. Popper mencoba melanjutkan ide Kant dengan menambahkan prinsip falsifikasi. Menurut Karl Popper, kesalahan adalah suatu yang manusiawi dan sesuatu yang pasti yang tak dapat dihindari. Kita tidak boleh menutup kesalahan bahkan menciptakan institusi yang mampu mendeteksi kesalahan dan memperbaikinya. Dia memberikan penjelasan ini dalam system demokrasi, kebenaran tetap merupakan dugaan dan kesalahan merupakan kepastian, kemajuan peradaban hanya dapat dijamin dengan sikap mengakui kesalahan dan belajar dari kesalahan-kesalahan dengan cara mengakui kesalahan dan memperbaiki kesalahan. Dengan konsep ini kita dapat menelusuri tapak-tapak masalah dalam negara kita yang menganut system demokrasi.

Karl Popper mencoba membuka ruang kritis untuk menelaah masalah-masalah yang sering terjadi dalam ranah politik. Dalam hal ini Karl Popper mencoba membuka ruang sadar akan beberapa aspek yang terkandung dalam beberapa ilmu. Dalam ilmu ekonomi, salah satu institusi yang dimaksud adalah mekanisme pasar yang bertujuan memastikan bahwa produk yang tidak diinginkan akan jarang diproduksi atau diberi batas produksi. ¹Dalam politik, mekanisme semacam itu termuat dalam struktur demokrasi, hukum, kebebasan pers, sampai pada batas tertentu, pemilihan umum semua ini merupakan mekanisme untuk mencegah kesalahan yang sama terulang dan politisi busuk akan diberi sanksi untuk tidak terpilih dalam pemilu berikutnya. Hal ini sangat erat kaitannya dengan permasalahan yang sering kali terjadi di Indonesia. Dimana pemimpin yang dianggap tidak produktif dalam masa jabatannya dan

¹ Karl R. Popper, *Gagalnya Historisisme*, penerj. Nena Suprpto (Jakarta: LP3ES, 1985) hlm. 16

ketika mencalonkan kembali ia tidak lagi terpilih. Begitu pula sebaliknya jika pemimpin dalam masa jabatannya memberikan kontribusi yang besar bagi rakyat maka rakyat juga akan menanam kepercayaan kepadanya dan akan memilih kembali ketika pemimpin itu mencalonkan dirinya untuk kedua kali. Pemilihan umum itu merupakan bukti nyata system demokrasi dilaksanakan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif, yang memberikan gambaran secara luas akan pemecahan masalah, yang berdasarkan analisis dan interpretasi penulis yang meliputi berbagai literatur-literatur yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Falsifikasi Popper sangat relevan dalam konteks demokrasi Indonesia karena prinsip dasar demokrasi adalah kebebasan untuk berpendapat dan berdebat. Di Indonesia, yang merupakan negara dengan keberagaman etnis, agama, dan budaya yang luas, penting sekali untuk memberikan ruang bagi beragam pandangan dan ide. Popper mengajarkan bahwa demokrasi yang sehat membutuhkan ruang untuk perdebatan yang bebas dan terbuka, di mana klaim-klaim politik atau kebijakan dapat diuji dengan argumen rasional dan data yang objektif.

Dalam praktiknya, banyak kebijakan pemerintah yang tidak selalu sesuai dengan kebutuhan atau harapan masyarakat. Di sinilah peran falsifikasi menjadi krusial. Falsifikasi mengingatkan kita untuk tidak menerima suatu kebijakan atau pandangan politik sebagai sesuatu yang sudah final. Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah harus bisa diuji, dinilai, dan jika perlu diperbaiki, berdasarkan hasil evaluasi dan bukti-bukti yang ada. Dengan membuka ruang untuk kritik dan penilaian ulang, demokrasi Indonesia bisa lebih berkembang dan responsif terhadap kebutuhan rakyat. Di Indonesia, polarisasi politik dan intoleransi sosial merupakan isu yang semakin terasa, terutama menjelang pemilu atau dalam perdebatan ideologis yang tajam. Ketika polarisasi politik terjadi, sering kali masyarakat terjebak dalam pemikiran "kubu" yang tidak terbuka untuk menerima argumen atau pandangan dari pihak lain. Hal ini dapat memperburuk ketegangan sosial dan merusak kualitas demokrasi. Teori falsifikasi mengajarkan pentingnya menguji dan memverifikasi klaim politik dengan dasar bukti yang objektif. Dalam demokrasi Indonesia, ini berarti bahwa setiap klaim yang dibuat

oleh partai politik atau kelompok tertentu harus bisa dipertanggungjawabkan dan diuji kebenarannya. Misalnya, klaim tentang keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan pemerintah harus didasarkan pada data yang valid dan bukan sekadar opini atau narasi yang bersifat emosional. Dengan mengedepankan falsifikasi, masyarakat akan lebih terfokus pada pengujian ide-ide secara rasional, bukan hanya berpegang pada keyakinan ideologis yang sempit. Salah satu prinsip fundamental dalam demokrasi adalah akuntabilitas pemerintah. Dalam sistem demokrasi Indonesia, pemerintahan harus selalu dapat diawasi, dipertanyakan, dan dikoreksi oleh publik jika kebijakan atau tindakannya tidak sesuai dengan kepentingan rakyat. Falsifikasi, dalam konteks ini, memberikan dasar bagi proses tersebut. Popper menekankan pentingnya sikap skeptis terhadap setiap klaim yang diajukan, dan ini sangat relevan dalam menilai kebijakan publik. Jika kebijakan pemerintah ternyata gagal atau berdampak negatif bagi sebagian besar rakyat, maka kebijakan tersebut harus dievaluasi ulang, dibongkar, dan diperbaiki. Prinsip falsifikasi mengajarkan bahwa tidak ada kebijakan atau ideologi yang harus dipertahankan hanya karena sudah diterima atau sudah berjalan sekian lama. Pemerintah yang sehat adalah pemerintah yang terbuka untuk dikritik dan siap untuk mengubah kebijakannya berdasarkan bukti dan hasil evaluasi yang objektif.

Tinjauan Historis Demokrasi Indonesia

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi. Kelahiran demokrasi di Indonesia bisa dibilang sejajar dari masa kemerdekaan sampai masa pasca-kemerdekaan.² Demokrasi di Indonesia awalnya diterapkan pertama kali oleh presiden Soekarno pada masa revolusi kemerdekaan yang dilatarbelakangi oleh kemendesakan situasi untuk segera memilih system politik yang cocok bagi negara Indonesia. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno terjadi dua kali pergantian model system demokrasi, dari demokrasi parlementer (liberal) ke demokrasi terpimpin. Demokrasi parlementer gagal karena Soekarno melihat system ini tidak efektif bagi dunia perpolitikan saat itu. Menjelang akhir 1950-an Soekarno mencoba system demokrasi dengan wajah baru yaitu demokrasi terpimpin. Dalam praktik demokrasi terpimpin bukan saja sangat demokratis melainkan juga mengarah pada kepada otoritarianisme. Bertolak dari berbagai sejarah perkembangan Indonesia, demokrasi seringkali mengalami pasang surut yang dimulai pada awal kemerdekaan. Hal ini

2 Emilianus Indra Parera, "Fenomena Politik Dinasti Tantangan Sistem Demokrasi" (Skripsi IFTK LEDALERO, Maumere 2023) hlm. 2.

terjadi karena adanya pergolakan politik.

Namun setelah berakhirnya Orde Lama tahun 1965, lahirlah Orde Baru yang secara radikal mengubah wajah demokrasi sedemikian rupa sehingga menjadi negara yang otoriter dan feodalistik. Hal ini ditandai dengan demokrasi yang kehilangan makna di dalam dirinya. Dibawah kendali Soeharto yang adalah seorang otoriter, suara dan aspirasi dari rakyat tidak didengarkan. Suara kritis rakyat pun sama sekali tidak diberi kebebasan. Seperti yang diketahui seperti pada pemerintahan orde baru ruang demokrasi bagi warga sangat terbatas karena kuatnya kontrol dari negara yang berujung pada perampasan hak-hak politik warga negara untuk mengaktualisasikan hak politiknya ditengah negara. Artinya pada masa orde baru keberadaan demokrasi sejatinya tidak mempunyai arti dan kehilangan makna didalamnya.

Konsep Dasar Demokrasi

Demokrasi telah menjadi istilah yang sangat diagungkan dalam sejarah pemikiran manusia tentang tatanan tahanan politik yang baik dan ideal. Secara historis, demokrasi merupakan sebuah ideology yang dinyatakan paling baik dan wajar untuk sebuah system organisasi politik dan social yang diperjuangkan oleh individu dan sebuah negara. Demokrasi pada umumnya dimengerti sebagai suatu system yang dapat memenuhi dan menjamin kepentingan masyarakat. Karena itu, demokrasi adalah system politik yang menganut system prinsip legitimasi suatu negara dimana kekuasaan berada pada tangan rakyat. Kekuasaan berada di tangan rakyat artinya bahwa rakyat memiliki peran yang sangat fundamen dalam mekanisme pemerintah. Oleh karena itu secara substansial konsep demokrasi lebih terarah kepada kepentingan rakyat yang menjadi prioritas dalam semua kebijakan sosio-politik yang diambil. Hak demokrasi seorang warga negara adalah hak keterlibatan dalam proses menentukan kebijakan bersama³. Menurut Schumpeter, demokrasi merupakan sebuah system yang memberikan peluang bagi rakyat untuk dapat menerima dan menolak mereka melalui proses pemilu yang kompetitif. Pandangan Schumpeter dikenal dengan demokrasi procedural yang mengisyaratkan perlunya arena terbuka dalam proses seleksi kepemimpinan, pembentukan opini dan kehendak dengan partisipasi publik seluas-luasnya. Sistem demokrasi sangat mengedepankan kedaulatan rakyat dan menjunjung tinggi kebebasan warga negara untuk memilih dan dipilih. Dalam hal ini dibutuhkan proses politik yang baik dan benar.

3 Felix Baghi (ed.) Kewarganegaraan Demokratis (Maumere, 2009), hlm 36.

Politik yang baik dan benar adalah sebuah system politik dianggap demokratis jika para pembuat keputusan (presiden, perdana menteri, legislatif) dipilih melalui pemilihan yang adil, jujur, dan para kandidat bebas bersaing untuk mendapatkan suara dari seluruh rakyat dewasa diberi kebebasan memilih. Di samping itu, demokrasi sebagai sistem politis adalah sebuah mekanisme politik untuk pengambilan keputusan publik yang mewujudkan kepentingan umum. Kepentingan umum merupakan tujuan utama dan paling mulia dalam negara yang demokratis. Sistem pemerintahan yang bercorak demokrasi terlihat sangat berbeda dari pemerintah yang hanya dipusatkan pada kekuasaan seseorang yang melanggar nepotisme. Seperti contohnya pada kekuasaan monarki dimana kekuasaan mutlak diturunkan hanya pada satu keluarga.

Politik Dinasti dan Akibatnya Bagi Kehncuran Demokrasi di Indonesia

Indonesia baru mengalami pembaruan politik mendasar sejak 1998 yang ditandai dengan adanya gerakan reformasi, dan berakhirnya system otoriter Orde Baru rezim Soeharto.⁴ Gerakan reformasi muncul karena rasa ketidakpuasan dan kekecewaan dari kaum muda terhadap pemerintah Orde Baru pada masa itu. Dengan demikian, pada akhirnya sistem Orde Baru ditumbangkan dengan dilengsernya Soeharto dari tahta kekuasaannya. Pada tahun 2004, Indonesia mengubah system pemilihan presiden dan wakil presiden dengan system pemilihan secara langsung. Hal ini mengubah wajah demokrasi Indonesia menjadi lebih baik. Kendatipun Indonesia terlepas dari genggaman rezim Soeharto, praktik demokrasi di Indonesia pun belum sepenuhnya bebas. Artinya eksistensi demokrasi yang ideal di Indonesia masih jauh dari harapan bangsa, dan bahkan hampir tidak mempunyai perwujudan yang konkret dalam perpolitikan di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh berbagai aspek dalam negara, salah satunya ialah adanya praktik politik dinasti yang tumbuh subur dalam dunia perpolitikan di Indonesia yang secara perlahan-lahan mengikis kualitas demokrasi bangsa.

Politik dinasti merupakan salah satu fenomena atau peristiwa munculnya calon pemimpin dari lingkungan kerabat atau kepala pemerintahan yang sedang memimpin atau berkuasa. Hal ini dapat kita saksikan sekarang, dimana Jokowi menggenggam erat politik dinasti secara terang-terangan, untuk melanggar kekuasaan. Hal ini terbukti bahwa Gibran anak Jokowi mencalonkan diri menjadi wakil presiden, secara terang terangan disini kita melihat adanya

⁴ *Ibid.*

praktik politik dinasti. Sebelum Jokowi turun dari kursi kekuasaan, ia menyodorkan Gibran untuk menjadi calon wakil presiden dan juga Kaesang yang menjadi ketua umum PSI. Cara ini juga bisa disebut nepotisme, dimana para pejabat bisa menjadikan keluarga atau kerabatnya menjadi pemimpin suatu institusi tanpa memperhitungkan jenjang karier, prestasi, dan kapabilitas. Politik dinasti diartikan sebagai suatu strategi politik untuk tetap menjaga kekuasaan dengan cara mewariskan kekuasaan yang telah ia miliki kepada orang yang merupakan keluarga atau kerabatnya sendiri. Menurut Warsisto gejala yang mendasari terbentuknya sebuah dinasti dapat dianalisis menjadi dua hal. *Pertama*, macetnya kaderisasi partai politik menjejaring calon kepala daerah atau pejabat public yang berkualitas sehingga hal tersebut menyebabkan terciptanya pragmatisme politik dengan mendorong kalangan keluarga atau kerabat untuk menjadikan pejabat publik. *Kedua*, konteks masyarakat menjaga adanya kondisi *status quo* di daerahnya yang menginginkan kepala daerah untuk berkuasa dengan cara mendorong sanak keluarga atau kerabat kepala daerah untuk menggantikan pertahanan. Fenomena ini sudah terlihat dalam politik Indonesia, hal ini menjadi bukti bahwa politik dinasti merupakan virus bagi kelangsungan negara yang menganut system demokrasi.

Di Indonesia praktik politik dinasti menjadi momok yang sangat menakutkan bagi masa depan anak-anak bangsa dan masa depan negara. Dilihat dari praktiknya politik dinasti di Indonesia bukanlah hal yang baru namun sudah lama terjadi⁵. Politik dinasti mulai muncul ketika lahirnya orde baru. Hal ini diawali dengan kehadiran Siti Hardiyanti Rukmana yang merupakan putri dari Soeharto yang sudah menjabat sebagai presiden setelah bertahun tahun lamanya. Siti Rukmana merupakan anggota MPR RI dari fraksi Golkar dari tahun 1992-1998. Setelah itu ia ditunjukan oleh ayahnya sendiri untuk menjadi menteri social ke-23, walaupun menjabat beberapa bulan karena adanya tuntutan reformasi dari rakyat Indonesia. Dari masalah ini, menariknya ketika Orde Baru runtuh, praktik politik dinasti bukannya mengalami penurunan melainkan meningkat dengan sangat cepat, fenomena ini tampak dari wajah politik Indonesia sekarang ini.

Disamping melanggar kekuasaan dan praktik korupsi, politik dinasti juga merupakan ancaman yang serius bagi kelangsungan sistem demokrasi di Indonesia khususnya dalam pelaksanaan pemilihan umum. Pemilihan umum merupakan salah satu sarana utama untuk menegakan tatanan politik yang demokratis. Artinya bahwa sebuah keputusan bersama

⁵ *Ibid.* hlm. 58

merupakan hasil dari sebuah proses demokrasi yang melibatkan semua warga negara untuk berpartisipasi dalam sosial dan politik, dimana partisipasi ini didasarkan pada rasionalitas dan ketidakberpihakan. Karena itu, pemilihan umum yang bebas dan rahasia adalah salah satu ciri negara dan masyarakat demokratis. Kenyataan ini menunjukkan adanya kebebasan bagi rakyat untuk membentuk organisasi, perkumpulan yang dianggap perlu guna melakukan berbagai hal demi mengisi dan mengembangkan kehidupan mereka baik sebagai pribadi maupun kelompok masyarakat. Hal ini juga bertaut dengan hak kebebasan masyarakat menyatakan pendapat dan pikiran.

Dibalik realitas ini, ada kecendrungan bahwa warga negara mengalami pelbagai kesulitan untuk terlibat aktif dalam proses politik. Hal ini sangat berbeda jauh dari konsep demokrasi yang sesungguhnya dimana rakyat harus memiliki peluang untuk mengambil bagian dalam proses politik. Artinya bahwa ada ruang partisipasi bagi seluruh masyarakat untuk ikut berkontestasi memperebutkan jabatan-jabatan mulai dari level regional hingga nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kehadiran politik dinastipun membuat kekhawatiran dan terjadinya ketidaksetaraan distribusi kekuasaan politik yang dapat mencerminkan ketidaksempurnaan dalam representasi demokratis dalam politik yang disebut dengan kekuasaan melahirkan kekuatan. Kehadiran politik dinasti yang melingkupi perebutan di level regional hingga nasional mengakibatkan substansi dari demokrasi sendiri sulit diwujudkan dalam kehidupan perpolitikan di Indonesia, dan hal inipun berdampak pada perkembangan demokrasi.⁶ Kesuburan politik dinasti tentu tidak terpisah dari peran partai politik dan regulasi pilkada sehingga kualitas demokrasi semakin suram dan terancam lenyap. Ditambah lagi proses pengawasan dan pembatasan praktik politik dinasti hanya diserahkan kepada landasan etik terkait kepatutan dan kepatutan. Karena pengawasan yang kurang ketat, politik dinasti justru terus berkembang dan menggerogoti kehidupan politik di Indonesia yang berdampak pada kualitas sistem demokrasi.⁷

Praktik politik dinasti dinasti tampak nyata dalam pemilihan umum dimana kedekatan atau relasi yang dibangun para elit politik dengan masyarakat baik secara personal maupun kelompok pada dasarnya mendahului kualitas. Dengan kata lain, praktik politik dinasti di Indonesia dapat menutup peluang lahirnya pemimpin yang berkualitas, dan melahirkan

⁶ *Ibid.* hlm 72

⁷ Nur Hidayati, *Dinasti Politik dan Demokrasi Indonesia* (Semarang: Penerbit Pt Gramedia 2014) hlm. 19

pemimpin abal-abalan karena adanya jaringan relasi. Ironisnya, banyak dari antara mereka hanya berorientasi pada materi belaka, bahkan melakukan tindakan korupsi dan mengabaikan tujuan utama yaitu kebaikan bersama. Pada tahap ini eksistensi politik dinasti di Indonesia merupakan sebuah strategi politik yang dirrangkai sedemikian rupa untuk mempertahankan kekuasaan atau *status quo* dengan cara mewariskan kepada orang lain yang masih memiliki hubungan dekat seperti keluarga, atupun kerabat dekat. Pada dasarnya politik dinasti menimbulkan banyak pro dan kontra, sebagian menganggap baik karena kesetabilan politik terjaga dan sebagian menganggap bahwa politik dinasti hanyalah alat yang digunakan para pejabat untuk melanggengkan kekuasaannya, dan mempersempit kesempatan bagi orang lain untuk berpartisipasi dalam lembaga perpolitikan, karena biasanya calon pemimpin dari politik dinasti lebih banyak sokongan. Disamping adanya pro dan kontra, ada juga pengertian positif dan negative tentang politik dinasti.

Politik dinasti pada hakekatnya merupakan salah satu strategi politik yang berbasiskan pertalian darah atau perkawinan yang berfungsi untuk mempertahankan dan melanggengkan kekuasaan dari waktu ke waktu⁸. Praktik ini ditandai dengan keikutsertaan suami, istri, anak dan kerabat lainnya dari keluarga pertahana untuk terlibat dalam kancah politik. Biasanya, praktik seperti ini dominan terjadi menjelang kontestasi politik. Tujuan utama dari tindakan ini ialah untuk memperoleh suara terbanyak guna memenangkan kontestasi politik. Dengan demikian mempermudah para elit dinasti menguasai berbagai sektor kehidupan bangsa. Disini, para elit politik dinasti dilihat sebagai orang yang memiliki sumber daya ekonomi yang tinggi yang dengan mudah memobilisasi hak suara rakyat dengan jaminan ekonomi dan sosial. Praktik seperti ini sudah dan sedang menguasai system pemerintahan dan menghancurkan system demokrasi di Indonesia. Dalam hubungannya dengan demokrasi politik dinasti menyebabkan kemunduran demokrasi. Kemunduran ini terjadi karena politik dinasti mengeliminasi rakyat dari partisipasi politik.

Demokrasi lahir sebagai kritik keras terhadap oligarki dan politik dinasti yang penuh bias dan ketidakadilan. Beberapa negara meyakini bahwa sistem demokrasi sebagai jalan keluar dari permasalahan keterbelakangan dari suatu negara. Prinsip bahwa suara rakyatlah yang akan menentukan kemajuan suatu negara adalah dasar utama kewenangan pemerintah untuk menetapkan suatu kebijakan. Dalam hal ini rakyat memiliki posisi terpenting walaupun secara

8 Ibid

operasional implikasinya tidak demikian. Demokrasi adalah system politik terbaik yang bisa diterapkan pada setiap negara. Demokrasi menjadi pandangan hidup hampir seluruh bangsa dalam menggerakkan sistem politik dalam negaranya. Dalam sistem demokrasi rakyat berhak menentukan arah nasibnya sendiri melalui system perwakilan yang ada di parlemen untuk dapat menyampaikan aspirasinya. Sebagai sistem yang menjamin kebebasan dalam menyampaikan pendapat, demokrasi membuka peluang pada setiap rakyat untuk menyampaikan segala hal yang menyangkut kepentingan serta ketidakpuasaan dalam hidup bermasyarakat. Demokrasi menjunjung tinggi nilai persamaan derajat tanpa memandang status sosial. Sistem demokrasi dapat menjamin kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat jika system demokrasi itu sendiri dapat dijalankan dengan baik.

Arus demokrasi yang semakin lama semakin kencang dan sulit dihindarkan, memaksa rakyat dunia ikut hanyut bersama harapan dan impian berdemokrasi.⁹ Bagi sebagian negara inilah demokorasi, inilah demokrasi, sebuah ideology yang menganggap bahwa dengan berdemokrasi keadilan bagi seluruh rakyat terwujud.¹⁰ Harapan ini bertolak dari motto demokrasi itu sendiri yakni dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat. Masyarakat melihat bahwa ada peluang besar untuk menyampaikan aspirasi tentang segala kebijakan dan apa saja mengenai roda pemerintahan. Namun pada kenyataannya demokrasi tidak sesuai dengan apa yang dikspetasikan oleh rakyat. Pada hal demokrasi yang kita junjungi justru menjadi suatu alat yang mengabaikan kemanusiaan. Kenyataan kita saksikan, sangat berbeda antara pilar-pilar dengan kenyataan pilar dengan kenyataan penerapam demokrasi. Suara rakyat yang menjadi pilar utama dari demokrasi telah berpaling dari motto demokrasi dan tidak berarti ketika berhadapan dengan tembok kekuasaan. Praktek-praktek negara yang mengklaim sebagai negara demokrasi ternyata seringkali bertentangan dengan kehendak mayoritas rakyat. Contoh sederhana yang dapat kita lihat dari berbagai peristiwa.

Disadari atau tidak, demokrasi saat ini tengah bergulir menjadi sendi terpenting yang sedang diperjuangkan oleh sebagian besar umat manusia sebagai landasan dari tata sosial. Kesadaran akan demokrasi ini bangkit sebagai respons dan bangkitnya sikap-sikap otoriter dan totaliteristik.¹¹ Demokrasi ditawarkan untuk menjadi tesis baru yang ingin mendasarkan diri pada prinsip-prinsip asasi berupa penghormatan atas nilai-nilai kemanusiaan. Dalam system

9 Mohamad Mulyadi, *Falsifikasi Demokrasi* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2019) hlm17

10

11 Ibid

yang otoriter dan totaliter, kebenaran dan otoritas dikendalikan secara sepihak oleh segelintir orang. Sementara mayoritas lainnya dengan terpaksa harus tunduk, patuh dan menerima. Dengan demikian, munculnya demokrasi merupakan resistensi sadar manusia atas proses dehumanisasi oleh sentralisasi kekuasaan. Demokrasi menghendaki adanya distribusi kekuasaan sehingga kekuasaan berjalan diatas sendi-sendi kemanusiaan dan dijalankan oleh manusia yang berakal budi, bukan pada elit yang hanya cinta kekuasaan. Sisi yang penting dari demokrasi adalah tuntutan untuk memberi penghargaan yang tinggi pada masyarakat.

KESIMPULAN

Demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat berubah menjadi pemerintahan dari elite, oleh elite dan untuk elite. Hal ini layak dan pantas dilabelkan pada system demokrasi sekarang yang tidak lagi memiliki jalan yang bernilai universal. Demokrasi dilihat sebagai bentuk persudaraan universal yang merangsang nurani kebangsaan manusia Indonesia untuk melakukan reformasi tindakan. Melihat politik dinasti yang langgeng dan bebas diterapkan di Indonesia, kedudukan masyarakat semestinya hadir untuk mengkritik guna mendekonstruksi nilai demokrasi yang hilang di tangan para pemimpin. Tindakan kritis itu mesti bersifat intensional agar membentuk sarkasme yang frontal bagi para pemimpin yang melanggar politik dinasti. Bias Politik dinasti menjadikan negara Indonesia kehilangan nilai demokratis yang telah tertanam kuat dalam system pemerintahan. Oleh karena itu, deliberasi sangat penting demi menjamin keterarahan demokrasi kepada tujuan utamanya yaitu kebaikan bersama.

Semestinya ada berbagai cara dan agenda yang dapat dilakukan dalam mengukuhkan demokrasi. Pembaharuan menjadi kata kunci dalam agenda pengukuhan demokrasi, baik mengenali apa yang kini sedang berlangsung maupun merumuskan masa depan¹². Kenyataan yang berlangsung telah mengingatkan kita bahwa pembaharuan bukanlah hal yang bakal datang dengan sendirinya, melainkan merupakan proses yang patut diupayakan dengan kesungguhan dan komitmen yang tinggi pada demokrasi. Tidak perlu diinkari bahwa jalan ke arah demokrasi merupakan rute yang paling sulit dilalui sekaligus membutuhkan biaya yang mahal. Cita-cita nasional untuk membawa seluruh rakyat kepada kemakmuran dan kesejahteraan dan sudah saatnya dijadikan spirit untuk membangun demokrasi, bukanlah sebaliknya menjadi argumen

12 Dadang Juliantara, *Meretas Jalan Demokrasi* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1998) hlm. 24

pragmatis untuk menolak tuntutan ke arah demokrasi. Dalam hal ini kita membutuhkan paling tidak dua hal untuk menuju perubahan. *Pertama*, pembukaan ruang politik masyarakat, baik untuk mengorganisasi diri maupun untuk mengaktualisasikan aspirasi rakyat. Sifat kebebasan untuk terbuka dan tidak diskriminatif. *Kedua*, dalam mendorong roda demokratisasi mesti dilakukan bersama. Dalam hal ini dibutuhkan kerja sama yang bersifat konstruktif atas semua unsur yang berkepentingan terhadap proses demokrasi.

Memilih pemimpin adalah salah satu ciri demokrasi. Masyarakat yang demokratis dapat mengalami pengalihan kepemimpinan secara relatif aman¹³. Didalam demokrasi para warga secara berkala dapat memilih pemimpinnya, mempertahankan yang ada apabila dipandang masih layak atau menggantikannya kalau ada alternatif lain yang dinilai lebih baik. Sebenarnya pemilu merupakan ukuran untuk menilai derajat demokrasi sebuah tatanan politis. Dalam pemilu masyarakat diberi kebebasan untuk memilih pemimpin yang dianggap produktif dalam mengatur system politik dan bijak terhadap segala hal yang menyangkut system pemerintahan. Masyarakat memilih secara terbuka, jujur dan bebas. Ketiga aspek itu menjadi dasar dari pemilu yang bersih. Namun realita yang terjadi sekarang adalah adanya fenomena money politik atau politik uang. Teori falsifikasi Karl Popper menawarkan perspektif yang sangat penting dalam mengembangkan dan memperkuat demokrasi di Indonesia. Dengan mendorong sikap terbuka terhadap kritik, pengujian klaim secara objektif, serta memastikan bahwa kebijakan dan ideologi dapat diuji dan diperbaiki, falsifikasi dapat membantu menciptakan peSalah satu tantangan besar dalam demokrasi Indonesia adalah menjaga kebebasan berpendapat dan menghindari pengekanan terhadap suara-suara yang kritis. Meskipun Indonesia memiliki kebebasan berpendapat yang dijamin oleh konstitusi, dalam praktiknya, kebebasan ini sering kali dibatasi oleh kebijakan atau tindakan pemerintah yang represif.

Falsifikasi membantu menjaga kebebasan berpendapat dengan memastikan bahwa setiap klaim atau ide yang diajukan dalam ruang publik bisa diuji dan dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini, setiap pihak, baik itu individu, kelompok, maupun pemerintah, memiliki hak untuk menyampaikan pandangannya, namun juga harus siap untuk mempertanggungjawabkan pandangan tersebut dengan cara yang rasional dan berbasis bukti. Dengan demikian, falsifikasi mendukung terciptanya ruang publik yang lebih sehat dan dinamis, di mana kebebasan berpendapat dapat berkembang tanpa mengorbankan akurasi dan kebenaran, pemerintahan

13 Paulus Budi Kleden, *Doping Politik* (Mauere: Penerbit Ledalero, 2013) hlm. 29

yang lebih akuntabel, responsif, dan bebas dari dogmatisme. Di tengah polarisasi politik dan tantangan demokrasi yang kerap mengemuka, falsifikasi menjadi alat untuk memelihara ruang diskursus yang rasional, inklusif, dan berbasis bukti. Dalam rangka mewujudkan demokrasi yang lebih matang dan sehat, penerapan prinsip falsifikasi ini menjadi langkah penting yang tidak hanya relevan dalam bidang ilmu pengetahuan, tetapi juga dalam praktik kehidupan politik dan sosial di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Popper, Karl. *Gagalnya Historisisme*, penerj. Nena Suprpto. Jakarta: LP3ES, 1985.
- Parera, Indra Emilianus. *Fenomena Politik Dinasti Tantangan Sistem Demokrasi*, Skripsi IFTK LEDALERO, Maumere 2023.
- Baghi, Felix. *Kewarganegaraan Demokratis*. Maumere: Penerbit Ledalero 2019.
- Hidayati, Nur. *Dinasti Politik dan demokrasi Indonesia*. Semarang: Pt Gramedia 2014.
- Mulyadi, Mohamad. *Falsifikasi Demokrasi*. Jakrarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia 2019.
- Budi Kleden, Paulus. *Doping Politik*. Maumere: Penerbit Ledalero 2013.
- Juliantara, Dadang. *Meretas Jalan Demokrasi*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius 1998.